

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Syahwinnur Khairullisan
NPM 1721020310



PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'YAH)

FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

**Syahnur Khairullisan
NPM 1721020310
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IAH)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Helma Maraliza, SEL., ME.Sy.**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 menyatakan mengenai pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung kini kewenangan terhadap SMA/SMK menjadi teralih. Dalam implementasi, pengalihan pengelolaan ini menimbulkan banyak permasalahan baru. Transisi ini tidak hanya menyangkut mengenai pelimpahan wewenang namun juga menyangkut personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Masalah dalam skripsi ini: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 yang kemudian ditinjau dari perspekif fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang ada kemudian langkah selanjutnya mencari data secara langsung pada informan. Untuk mengetahui Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan peralihan kewenangan SMA/SMK menjadi tanggung jawab Provinsi. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari

pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaannya berjalan secara bertahap mengingat wilayah Provinsi Lampung yang luas. Peralihan tersebut dilihat dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* yang lebih teknis menerapkan *siyasah tanfiziyah*. Di dalam *siyasah tanfiziyah* segala sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan demi mencapai suatu kemaslahatan dalam bernegara. Pelaksanaan peralihan kewenangan ini harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis,

Syahwinnur Khairullisan

NPM 1721020310



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN
SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung)**

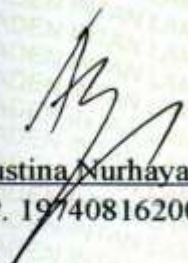
**Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

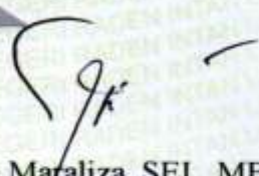
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

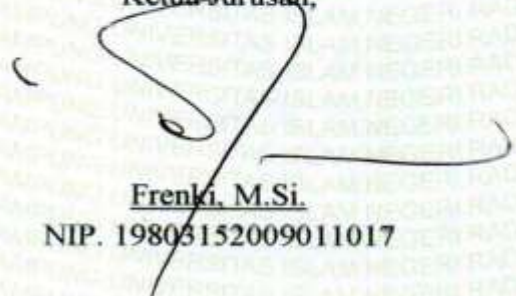
Pembimbing I

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004


Helma Maraliza, SEI., ME.Sy.
NIP.

Ketua Jurusan,


Frenki, M.Si.
NIP. 19803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Teip. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)” disusun oleh, Syahwinnur Khairullisan NPM : 1721020310, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I. (.....)



MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(Q.S. An-Nisa [4]: 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua Orangtua, yang sangat berjasa dalam merawat, mendidik, membimbing dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira, serta memberikan suport baik segi moral maupun material.
2. Kakak dan adik yang penulis sayangi, yang selalu memberikan support secara langsung maupun tidak langsung.
3. Almamater Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan serta pengalaman sehingga saya bisa berproses menuju tahap selanjutnya.

RIWAYAT HIDUP

Syahwinnur Khairullisan, lahir pada 21 Januari 1999 di Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Merupakan Putra kedua dari tiga bersaudara. Adapun riwayat pendidikan peneliti dimulai dari taman kanak-kanak di TK Pembina selama kurun (2004-2005), SD Negeri 1 Way Mengaku selama (2005-2011), SMP Negeri 1 Liwa dalam kurun (2011-2014), dan SMA Negeri 1 Liwa selama kurun (2014-2017).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG)”

Bandar Lampung, Mei 2022
Yang Membuat,

Syahwinnur Khairullisan
NPM: 1721020310

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1). Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Karena itu penulis ucapkan terimakasih setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Helma Maraliza, SEI., ME.Sy. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukkan, serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih untuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang telah memberikan data-data yang diperlukan dan izin untuk penelitian.
9. Terimakasih untuk SMKN 1 Liwa, SMK N 4 Bandar Lampung, SMK N 1 Liwa, dan SMA N 3 Bandar Lampung yang telah memberikan data-data yang diperlukan dan izin untuk penelitian.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Aamiin Yarobbal Alamin.*

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis,

Syhwinnur Khairullisan
NPM. 1721020310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah	18
2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah	20
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	28
4. Konsep dan Aplikasi Siyasah Dusturiyyah	33
B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung	37
1. Teori Desantralisasi	37
2. Otonomi Daerah.....	44

3. Teori Kewenangan	47
4. Pendidikan Menengah	51
5. Desentralisasi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah	52
6. Desentralisasi pendidikan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	53
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta SMA	59
1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	59
2. Gambaran Umum SMA N 1 Liwa	62
3. Gambaran Umum SMAN 3 Bandar Lampung	65
4. Gambaran Umum SMKN 1 Liwa	66
5. Gambaran Umum SMKN 4 Bandar Lampung	68
B. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Menjadi Tanggung Jawab Provinsi	79
---	----

- B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Menjadi Tanggung Jawab Provinsi83

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 87
B. Rekomendasi..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)” maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan dalam kehidupan nyata.¹
2. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.²
3. Perspektif *Fiqh siyasah* merupakan pandangan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* sendiri merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³ Tapi yang dimaksudkan di sini adalah *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan syariat Islam atau nilai-nilai syariat.⁴
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019. 1216.

² Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2016). 69.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). 4.

⁴ Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>. 125.

Lampung merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Daerah (Perda) untuk mengembalikan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁵

5. Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi secara seksama melakukan inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Desember 2016.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian mengenai kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pengelolaan SMA/SMK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dibidang pendidikan, dan menurunkan kesenjangan kualitas pendidikan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung yang kemudian dianalisis menurut *fiqh siyashah*.

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

⁵ Pemerintah Provinsi Lampung, “Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung” (2016).

⁶ Ibid.

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁷ Dengan kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara, sehingga dapat memajukan negara tersebut. Guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 menyatakan mengenai pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan bangsa tersebut pemerintah wajib memberikan pendidikan yang layak kepada rakyat Indonesia. Lebih jelas UUD 1945 pasal 31 angka (1) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan angka” (2) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh sebab itu, dalam rangka keseriusan pemerintah, pemerintah daerah mengalokasikan sebanyak sekurang-kurangnya 20% dana dari APBD untuk sektor pendidikan wilayah Indonesia.⁸

Diterbitkannya Undang-Undang yang lebih baru bertujuan untuk memperbaiki Undang-Undang yang sebelumnya memiliki kelemahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dicabut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun kelemahan Undang-Undang tersebut yaitu (1) ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang ini seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan; (2) perlunya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat; (3) banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kabupaten/kota tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).

⁸ Sulpakar, “Ketua DPR Bambang Soesatyo Meminta Pemerintah Daerah Merealisisikan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya 20 Persen Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).,” *Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung*, November 12, 2019.

dialokasikan, banyaknya urusan pemerintahan cenderung membuat pemerintahan daerah dengan otonomi luasnya memperbanyak struktur kelembagaan sehingga terjadilah pembengkakan biaya aparatur atau *overhead cost*.

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meminimalisir hal tersebut, dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini pemerintah memangkas 31 urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi 20 urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satu diantaranya adalah kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah.⁹

Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini berlaku terjadi beberapa perubahan terutama mengenai pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) yang awalnya merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota kini naik menjadi tanggungjawab provinsi dan sudah harus mulai dijalankan terhitung Januari 2017.

Komponen penting dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang baik dapat menghasilkan pelayanan yang baik pula. Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.¹⁰

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung dikeluarkan

⁹ Sella Nova Damayanti, "Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kota Surabaya Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 23 (2014). 1.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan" (2010).

guna mempertegas kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan lebih menjelaskan dengan detail mengenai bagaimana pengelolaan pengembalian kewenangan tersebut.

Pengalihan kewenangan pendidikan bertujuan untuk memudahkan pemerintah Provinsi meratakan kebijakan pengelolaan pendidikan. Hal tersebut untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat. Baik meliputi peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Alih kelola ini berimplikasi terhadap pola kewenangan pemerintah daerah, antara lain baik dalam segi administratif, teknis, maupun keuangan.¹¹

Dalam pelaksanaannya, urusan pengalihan pengelolaan ini menimbulkan banyak permasalahan baru. Transisi ini tidak hanya menyangkut mengenai pelimpahan wewenang namun juga menyangkut mengenai personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D)¹². Dengan banyaknya jumlah sekolah yang ada di Provinsi tidak memungkinkan pemerintah Provinsi dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada secara maksimal. Sehingga, kontribusi yang diberikanpun sedikit sekali, berbeda ketika di pegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.¹³ Selain mengenai pelayanan pendidikan, terhadap masalah lain pada pemerintah Provinsi yaitu kemampuan anggaran. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah banyak pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sekolah gratis. Ketika alih wewenang

¹¹ Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Tetappendidikan Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi" (Kalimantan Tengah, 2014), 1–13.

¹² Venty Eka Satya, "Analisis Pengalihan Aset SMA / SMK Sebagai Dampak Dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah Di Bidang Pendidikan : Studi Di Provinsi Banten" 10, no. 2 (2019). 78.

¹³ Heru Guntoro, "Pengelolaan SMA/SMK, Herman HN Minta Hal Ini Ke DPD RI," Gesuri.Id, 2020, <https://www.gesuri.id/pemerintahan/pengelolaan-sma-smk-herman-hn-minta-hal- ini-ke-dpd-ri-blYQLZuXr>.

dilaksanakan namun tidak dibarengi anggaran yang dinaikkan mengakibatkan program sekolah gratis tersebut membebani pemerintah provinsi. Akibatnya, program tersebut terpaksa tidak dapat dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi.

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas pendidikan terletak diseluruh wilayah Indonesia.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia bagi manusia itu sendiri.¹⁴ Di dalam *fiqh siyasah* terbagi menjadi beberapa ruang lingkup salah satunya yaitu *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan. Di mana, perundang-undangan tersebut mengatur antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertuang alenia keempat yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung). Sebagai argumen pentingnya masalah ini diteliti: Pertama, pendidikan merupakan hal terpenting untuk negara sehingga dengan pendidikan yang baik dan terencana dapat terbentuk masyarakat yang cerdas serta sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, peralihan kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri dengan pengelolaan yang baik.

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 4.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitiannya adalah implementasi pengelolaan kewenangan bidang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Sedangkan sub fokus penelitian ini yaitu tentang:

1. Sistematisa pengelolaan setelah pengalihan kewenangan.
2. Dampak positif dan negatif dari alih wewenang tersebut.
3. Peran pemerintah provinsi dalam memajukan kecerdasan bangsa yang merata khususnya di Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu terdapat beberaparumusan masalah yang diperoleh, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung

2. Mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan politik dalam Islam. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UIN Raden Intan Lampung khususnya Prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan dan dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung. Selain itu juga dapat mengembangkan ilmu yang relevan bertujuan untuk membangun Provinsi Lampung berpendidikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah mengenai peralihan pengelolaan kewenangan banyak terjadi di Indonesia. Sehingga penelitian ini telah banyak dilakukan diberbagai daerah yang terdampak oleh peralihan kewenangan ini. Namun, karena masih banyak hal menarik yang dapat diteliti maka penulis tertarik untuk membahasnya kembali khususnya tentang Transisi Peralihan Pengelolaan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK Setelah di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung. Karya sebelumnya yang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Imam Prasetyo (2017), skripsi dengan judul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*

Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kota Blitar)” Hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Maka, kewenangan tersebut bisa diberikan ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan wajib didukung sepenuhnya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Imam yaitu tentang alih kewenangan yang dibentukkan kedalam *fiqh siyasah*. Sedangkan perbedaannya adalah Imam lebih membahas mengenai latar belakang ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.¹⁵

2. M. Helmi (2018), skripsi dengan judul *“Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan dan Anggaran Pendidikan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”* Hasil penelitian diketahui bahwa pergeseran kewenangan pendidikan dilatarbelakangi oleh upaya merumuskan kembali konsep ideal otonomi yang telah mengalami penggemukan. Pergeseran kewenangan berimpikasi terhadap politik hukum penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY serta terjadi peralihan asset pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke Provinsi DIY. Persamaan skripsi ini dengan skripsi M. Helmi yaitu membahas mengenai pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan Helmi yaitu membahas mengenai Impikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sedangkan skripsi

¹⁵ Imam Prasetyo, “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sma/Smk Ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota Blitar) Skripsi” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

ini membahas mengenai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.¹⁶

3. Ahmad Yusuf Iskandar (2018), skripsi dengan judul *“Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Mojokerto)”* Hasil penelitian diketahui bahwa dari kebijakan alih kelola SMA/SMK di wilayah Mojokerto Raya terdapat dampak yang timbul, antara lain, di Kabupaten Mojokerto mempunyai program merevitalisasi sekolah dan menjadi sekolah bertaraf internasional dengan adanya kebijakan tersebut maka Pemkab Mojokerto batal melaksanakan program tersebut, dan kehilangan aset sekolah, di Kota Mojokerto juga menghapus program pendidikan gratis jenjang SMA/SMK, sehingga orang tua kembali membayar SPP dan kehilangan aset sekolah. Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai pengelolaan pengambilalihan SMA/SMK. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam pengelolaan SMA/SMK.¹⁷
4. Nunik Retno Herawati (2017), jurnal dengan judul *“Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi”* Hasil penelitian diketahui bahwa dengan alih kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi maka

¹⁶ M Helmi, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Dan Anggaran Pendidikan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁷ Ahmad Yusuf Iskandar, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah” (UIN Sunan Ampel, 2018).

guru dan tenaga kependidikan yang semula berstatus PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi PNS Daerah Provinsi. Persamaan skripsi ini dengan jurnal oleh Nunik yaitu membahas mengenai efek dari alih kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam jurnal Nunik yaitu jurnal ini terfokus kepada pengelolaan Guru SMA/SMK, sedangkan dalam penelitian ini tidak terfokuskan dan lebih umum dan menyeluruh.¹⁸

5. Venty Eka Satya (2019), jurnal dengan judul “*Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten*” Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses pengalihan aset dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat antara lain singkatnya waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap serah terima aset, banyaknya aset yang tidak memiliki dokumen lengkap, serta keterbatasan personel. Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pengalihan kewenangan di bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini lebih membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengalihan aset dalam pengelolaan SMA/SMK.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan

¹⁸ Nunik Retno Herawati, “Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi,” *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2018): 72, <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.72-93>.

sistematis. Rasionalitas artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang bermakna agar nalar manusia dapat mencapai tujuannya. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.¹¹

Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode normatif-empiris. Dimana peneliti mencari tau bagaimana penerapan dari sebuah Undang-Undang yang ada di kehidupan nyata. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung di Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.¹⁹ Yaitu mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011).
105.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa ada intervensi dari pihak lain melalui metode wawancara. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber pertama yaitu melalui informan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMAN 1 Liwa, dan SMKN 1 Liwa yang mengetahui secara langsung bagaimana peralihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua digunakan sebagai penunjang dari data primer. Dalam hal ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, bukuharian, dan seterusnya.¹² Perolehan data pada penelitian ini dapat diperoleh media *massa* secara *online* atau surat kabar.

Selain itu data sekunder yang didukung dengan buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, hewan, peristiwa, atau benda yang tinggal

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2018). 126.

bersama yang mempunyai saling keterkaitan tertentu. Adapun yang menjadi objek populasi dari penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta 520 SMA Negeri dan 492 SMK Negeri yang ada di Provinsi Lampung .

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, serta dianggap dapat mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yaitu untuk memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti dengan jalan hanya mengambil sebagian dari populasi yang jumlahnya banyak. sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu di mana peneliti menentukan sampel yang akan diambil yang kemudian penentuan sampel menggunakan teknik pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel.²¹ Maka, sampel tidak diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung beserta kesekretariatannya (berjumlah dua orang).
- 2) SMA/SMK Negeri yang ada di Provinsi Lampung sebanyak empat informan yang terdiri dari perwakilan SMA Negeri 3 Bandar Lampung, SMK Negeri 4 Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Liwa, dan SMK Negeri 1 Liwa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekaligus untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.²² Observasi yang digunakan yaitu dengan

²¹ Ibid.133.

²² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

mengamati implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui lebih dalam informasi dari responden dan jumlah responden yang sedikit atau kecil, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka (*Face to Face*) atau melalui telepon.²³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan Narasumber yaitu Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMA Negeri 1 Liwa, dan SMK Negeri 1 Liwa dengan membahas mengenai bagaimana pengelolaan SMA/SMK setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan arsip, dokumen, buku- buku, dan sebagainya untuk mendukung penelitian ini. Buku-buku yang digunakan yaitu *Fiqh siyasah*, Pengantar Pemerintahan Daerah, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Dinamika Politik Hukum Indonesia, dll.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015). 12.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan dirasa cukup, maka data tersebut harus diolah. Pengolahan data harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan kode etik yang ada. Pengolahan data yang biasa dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang diperoleh dari lapangan ataupun literature.²⁴
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, dan urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi, yaitu pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dan buku-buku yang ada.

Kaitan hal tersebut dengan skripsi ini adalah peneliti mencoba menganalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta pernyataan dari sumber primer. Metode induktif digunakan pada saat penulis mencari, mengolah, dan menulis skripsi ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung.

²⁴ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010). 69.

²⁵ Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 9.

I. Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas perspektif teori yang terdiri dari konsep *Fiqh siyasah* serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Bab III membahas deskripsi *information* yang terdiri dari gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Bab IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang analisis Transisi Pengelolaan Kewenangan SMA/SMK sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung serta Pandangan *Fiqh siyasah*.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dapat disimpulkan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan secara baik sejak tahun 2017. Proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat luasnya wilayah di provinsi Lampung. Dinas pendidikan provinsi Lampung melakukan survey secara bergilir dari waktu ke waktu ke seluruh sekolah yang ada di provinsi Lampung. Dengan adanya peralihan kewenangan ini, proses birokrasi menjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, kesetaraan pendidikan juga tercapai sehingga tidak ada kesenjangan diantara pendidikan yang ada di provinsi Lampung.
2. Analisis *fiqh siyasah* yang lebih spesifik pada *siyasah dusturiyah* yang menekankan pada *Siyasah tanfiziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Pelaksanaan peralihan kewenangan ini merupakan amanah dari pemerintah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Agar tidak ada lagi sekolah yang tertinggal dan kualitasnya buruk sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia, dimana hal tersebut merupakan untuk kemaslahatan umat sendiri hal tersebut sesuai dengan *siyasah tanfidziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas ke dalam kemaslahatan.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pendidikan khususnya terhadap pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung dikemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diharapkan akan terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka pengimplementasian undang-undang tersebut, agar pendidikan di provinsi Lampung kualitasnya menjadi rata dan semua anak-anak dapat bersekolah hingga ke jenjang SMA/SMK bahkan yang lebih tinggi lagi.
2. Kepada pihak sekolah SMA/SMK di provinsi Lampung diharapkan dapat menjalani semua program-program yang telah dicanangkan oleh pihak dinas pendidikan provinsi dengan baik.

Daftar Rujukan

- Abdul Khadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, And Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad Bin Makram Bin Manzur Al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Jilid 11. Beirut : Daru Sadir, N.D.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Al-Adalah* Xii (2014).
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, And Jt. Pareke. *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ojk*. Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- Damayanti, Sella Nova. “Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kota Surabaya Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Uu No . 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, No. 23 (2014).
- Dinas Pendidikan, Provinsi Lampung. “Sejarah.” Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2022. <https://Disdikbud.Lampungprov.Go.Id/Perencanaan/Sejarah.Html>.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: Pt Grafindo Persada, 2010.
- Habibi, Fikri. “Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan Sma/Smk Di Provinsi Banten.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 5, No. 2 (2017): 11–22. <https://Doi.Org/10.30656/Sawala.V5i2.469>.

- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 1 (2022): 1–20.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasa Dusturiyyah.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 4, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/Al-Ahkam.V4i2.1530>.
- Helmi, M. “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Dan Anggaran Pendidikan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Herawati, Nunik Retno. “Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi.” *Jurnal Ilmu Sosial* 16, No. 2 (2018): 72. <https://doi.org/10.14710/Jis.16.2.2017.72-93>.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” *Tafaqquh* 1, No. 2 (2013): 1–21.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasa*. Yogyakarta: Pustaka Almada, 2015.
- Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar, Ahmad Yusuf. “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasa.” Uin Sunan Ampel, 2018.
- Izlindawati, Asmaeny Azis. *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018): 18–28.
- Junita, Lia. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah." Iain Bengkulu, 2020.
- Kahfi, Syuratul. "Peralihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sma/Smk Di Provinsi Lampung." *Fiat Justisia Journal Of Law* 10, No. 4 (2016): 663–78.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Isti'dal*, 2014.
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila & Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kusnardi, Moh & Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indaonesia Dan Cv Sinar Bakti, 2010.
- Liwa, Smk Negeri 1. "Profil Smk Negeri 1 Liwa." Portal Smk Negeri 1, Liwa, 2022. <https://www.smknegeri1liwa.sch.id/>.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Munir, Fuady. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Muslimin, Muhammad. *Kebijakan Desentralisasi Dalam Otonomi Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Fatima, 2007.
- Panjaitan, Dennis Abel Timotius, And Suhartoyo Budi Gutami. "Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Bidang Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1–19.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kbbi - Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Ujdih. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Tetappendidikan Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi," 1–13. Kalimantan Tengah, 2014.

- Provinsi Lampung, Pemerintah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung (2016).
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, And Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021).
- Rizal, Lutfi Fahrul. “Perspektif Siyâsah Syar’ Iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pendahuluan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14 (2020). <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.
- Samsu, La. “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ’iyyah.” *Tahkim* Xiii (2017).
- Saputro, A, And T Rahaju. “Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota ...)” *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2018. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23183%0ahttps://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/download/23183/21202>.
- Satya, Venty Eka. “Analisis Pengalihan Aset Sma / Smk Sebagai Dampak Dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah Di Bidang Pendidikan : Studi Di Provinsi Banten” 10, No. 2 (2019).
- Sma Negeri 1 Liwa. “Profil Sma Negeri 1 Liwa.” Liwa, Sma Negeri 1, 2022. <https://www.sman1liwa.sch.id/p/profil-sma-negeri-1-liwa.html>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2015.
- Subana, M, And Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Kedua. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Sulpakar. “Ketua Dpr Bambang Soesatyo Meminta Pemerintah Daerah Merealisasikan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya 20 Persen Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd).” *Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung*. November 12, 2019.
- Syafe’i, Zakaria. “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Alqalam*, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syukur, Iskandar. “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi.” *Asas*, 2019.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah*. Darul Qalam: Al-Qahirah, 1988.
- Yurine, Devi Elthia. “Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Di Bidang Pendidikan Sma Smk Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Provinsi Ntb).” *Universitas Mataram*, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Pedoman Wawancara
Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?
2. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung sistem pastinya berubah. Bagaimana dampak dari perubahan tersebut? Serta bagaimana penerapan peralihan tersebut?
3. Dengan personel yang terbatas bagaimana cara pemerintah provinsi menjangkau seluruh sekolah yang ada di provinsi Lampung. Agar mendapatkan pendidikan yang layak dan setara?
4. Apasaja dampak positif dan negative dari peralihan kewenangan tersebut?
5. Mengapa alih wewenang ini harus segera dilaksanakan?
6. Kapan pelaksanaan Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?

Pedoman Wawancara Kepada SMA/SMK

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?
2. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung sistem pendidikan pastinya berubah. Bagaimana dampak dari perubahan tersebut? Serta bagaimana penerapan peralihan tersebut disekolah ini?
3. Apasaja dampak positif dan negative dari peralihan kewenangan tersebut?
4. Dengan situasi masyarakat yang tidak semuanya mampu, ditambah lagi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terdapat banyak sekali orang tua yang tidak mampu membayar SPP atau melanjutkan sekolah anaknya ke yang lebih tinggi yang sebelumnya digratiskan. Sehingga, banyak anak yang menunggak pembayaran, bagaimana peran sekolah ini dalam menangani hal tersebut?
5. Selain permasalahan mengenai uang iuran sekolah, apasaja dampak lainnya dari peraturan tersebut?





LAMPIRAN DOKUMENTASI







KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syahwinur Khairulhwan
 NPM : 172020310
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
 Pembimbing II : Helma Marafiza, SEI, ME.Sy
 Judul : IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

No.	Tanggal	Pembimbing	Pokok Pembahasan	Paraf
1.	13 Juni 2021	Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H	- Mengganti judul dengan Perda serta mengganti	
2.	18 Juni 2021	Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H	- Analisa menjadi implementasi	
3.	11 Oktober 2021	Helma Marafiza, SEI, ME.Sy	- Memperbaiki penduan Cover - Memperbaiki Fokus dan Sub Fokus - Memperbaiki footnote	
4.	11 November 2021	Helma Marafiza, SEI, ME.Sy	- Memperbaiki Footnote - Memperbaiki rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian	



5.	16 November 2021	Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki judul skripsi - Menegaskan penegasan judul - Menambahkan gambaran tentang fiqh siyasah dalam EBM - Memperbaiki teknik penulisan 	
6.	1 Desember 2021	Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki penegasan judul - Menyesuaikan rumusan dengan rumusan masalah 	
7.	15 Desember 2021	Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H	- Acc. dilanjutkan hingga Bab V	
8.	7 April 2022	Helma Maralisa, SEL, ME.Sy	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Footnote - Memperbaiki Penulisan 	
9.	17 April 2022	Helma Maralisa, SEL, ME.Sy	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Abstrak - Memperbaiki populasi dan sampel 	
10.	19 April 2022	Helma Maralisa, SEL, ME.Sy	- Acc. Lanjut ke Pembimbing I	

11.	20 April 2022	Agastina Nurhayati, S.Ag., M.H	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki Kesimpulan- Menambahkan Footnote	
12.	19 Mei 2022	Agastina Nurhayati, S.Ag., M.H	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki Bab II- Memperbaiki Penulisan- Acc untuk ujian Munaqasah	





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs.Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

Bandar Lampung, 25 November 2021

Nomor : 800/ 3214 /V.01/DP.1A/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada
Yth. Rektor Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
C.q. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di
Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.1890/Un.16/DS/PP.009/11/2021 tanggal 11 November 2021 Hal Permohonan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat menerima dan memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara yang akan melakukan penelitian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dalam rangka penyelesaian tugas penulisan Skripsi dengan Judul "*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fikih Syiyah*", atas nama:

Nama : SYAHWINNUR KHAIRULLISAN
NPM : 1721020310
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyah Syar'iyah)
Jenjang : Strata Satu (S1)

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Terbaca:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Suiko Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476302 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretaris@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/01217/SKP/III.16/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/126/IV.05/XI/2021 Tanggal 24 NOVEMBER 2021, yang berlandaskan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : SYAHWINNUR KHAIRULLISAN
2. Alamat : WAY MENGAKU KEL./DESA WAY MENGAKU KEC. BALIK BUKIT KABKOTA LAMPUNG BARAT PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 17 NOVEMBER 2021
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATANEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : A. KUMEDI JAFAR
10. Anggota Penelitian : SYAHWINNUR KHAIRULLISAN
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Kelentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 26 November 2021



Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. BAPPEDA Kota Bandar Lampung
3. Partogal



Scanned with
CamScanner

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Sri Mulatsih
Pekerjaan : Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Liwa

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasa Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasa (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Santi
Pekerjaan : Staff Bidang SMK Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Muhammad Yusuf Muis
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Liwa

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasaah Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Ronal
Pekerjaan : Staff Bidang SMA Dinas Pendidikan
Provinsi Lampung

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Sri Mulatsih
Pekerjaan : Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4
Bandar Lampung

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surat Keterangan Wawancara

Identitas Responden

Nama : Tri Winarsih
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Liwa

Menyatakan Bahwa

Nama : Syahwinnur Khairullisan
NPM : 1721020310
Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar'iyah

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian Kewenangan Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Sutrisno, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780897-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-35 58 / Un.16 / P1 / KT / V / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
SYAHWINNUR KHAIRULLISAN	1721020310	FS/HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyerahan di Pusat Perpustakaan

Implementasi Pengembalian
Kewenangan SMA/SMK dari
Pemerintah Kabupaten/Kota Ke
Pemerintah Provinsi Lampung
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di
Dinas Pendidikan Provinsi
Lampung)

by Syahwinnur Khairullisan

Submission date: 25-May-2022 002:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1843156014

File name: Syahwinnur_bab_1_4_5_turnitin_1.docx (295.96K)

Word count: 4702

Character count: 33422

Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

ORIGINALITY REPORT

14%	%	9%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
3	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
5	Ade Kurniawan. "Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam", Tsamratul Fikri Jurnal Studi Islam, 2019 Publication	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1%
7	Muhammad Julham. "Local Government Authority in Forest Protection in Tagafura	1%

Protected Forest Area, Tidore Islands City",
Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2020
Publication

8	Submitted to SMA Alfa Centauri Student Paper	1%
9	Hermin Tri Prasetyowati, Mulyoto Mulyoto. "Manajemen Pelestarian Naskah Kuna Guna Meningkatkan Kualitas Di Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta", Media Manajemen Pendidikan, 2020 Publication	1%
10	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
11	Agarita Clara Womsiwor, Siti Rofingatun, Theo Allolayuk. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020 Publication	1%
12	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
13	Rofingi Rofingi. "Analisis Distorsi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terhadap Proyek PLTPB",	1%

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi,
2018

Publication

-
- | | | |
|----|---|-----|
| 14 | Submitted to IAIN Kudus
Student Paper | 1% |
| 15 | Aiman Faiz, Muhamad Parhan, Rizki Ananda.
"Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe",
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022
Publication | <1% |
| 16 | Anisa Nurul Rahma. "INFLUENCE OF
ELECTRONIC WORD OF MOUTH ON E-
COMMERCE CUSTOMER DECISION PROCESS
IN INDONESIA", JSSH (Jurnal Sains Sosial dan
Humaniora), 2020
Publication | <1% |
| 17 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper | <1% |
-

Exclude quotes

Exclude matches < 5 word

Exclude bibliography